



Pancasila Sebagai Sistem Etika





Pancasila Sebagai Sistem Etika



Riska Nava Mutiara
2017061028
Pendidikan Pancasila

ETIKA PANCASILA

 **PANCASILA** = Rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

 **ETIKA** = ilmu yang berisi tentang watak, perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat di nilai baik dan mana yang dapat di nilai tidak baik serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral

ETIKA PANCASILA

Etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.



ETIKA PANCASILA

Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia.

01

Nilai yang pertama adalah Ketuhanan. Secara hirarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaedah dan hukum Tuhan.

02

Nilai yang kedua adalah Kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai Kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai Kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan.

ETIKA PANCASILA

03

Nilai yang ketiga adalah Persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk, demikian pula sikap yang memecah belah persatuan.

04

Nilai yang keempat adalah Kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting yaitu nilai hikmat/kebijaksanaan dan permusyawaratan.

05

Nilai yang kelima adalah Keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak.

Contoh Pancasila sebagai Sistem Etika

1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama sehingga terjadi kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mengakui adanya kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya
4. Tidak memaksakan agama yang dianutnya kepada orang lain
5. Tidak mengatasnamakan agama untuk kepentingan sendiri atau kelompok yang memicu adanya konflik.
6. Mengakui persamaan derajat, status sosial dan hak asasi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
7. Saling menghormati dan mencintai, tidak memiliki stereotip negatif antar sesama manusia.
8. Tidak melakukan *bullying*, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang lain baik melalui verbal maupun fisik

Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika

- Masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara
- Masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integrasi nasional
- Masih terjadinya pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- Terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya serta masih terdapatnya kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan
- Masih adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia
- Banyak terjadi pengingkaran dalam pembayaran pajak, dan sebagainya.

Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika

Pancasila sebagai sistem etika memerlukan kajian kritis-rasional terhadap nilai moral yang hidup agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya korupsi terjadi karena pejabat diberi hadiah oleh seorang yang membutuhkan sehingga urusannya lancar. Dia menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan bantuan. Sehingga tidak tahu kalau perbuatannya dikategorikan dalam bentuk suap.

1. Menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara.
2. Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional dan internasional
3. Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila
4. Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan

Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Sila Ketuhanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya.

Sila Kemanusiaan memiliki prinsip *acta humanus*. Tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi (kebajikan dan kearifan).

Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Sila Persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pemecah belah bangsa.

Sila Kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat.

Sila Keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja (deontologi) atau tujuan saja (teleologi). Akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan (*virtue ethics*).

K e s i m p u l a n

Dari penjelasan yang dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam arti norma dasar (*grundnorm*) yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan.

Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila.

